

Modernisasi Teknologi Informasi dan SAP Pada Laporan Keuangan Di Moderasi Kapasitas SDM

Dwirini

Universitas Terbuka

dwirinid14@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 7 Desember 2022

Disetujui : 6 Januari 2023

Dipublikasi : 1 April 2023

ABSTRACT

This study aims to examine the moderation of HR capacity towards information technology modernization, and SAP with government financial reports. The study population was all civil servants/non civil servants with bachelor's degrees (S1) in all majors who worked in each SKPD. Researchers used a sampling technique in the form of nonprobability sampling by means of convenience sampling and obtained a sample of 72 respondents. This type of research is quantitative research with primary data using a questionnaire as data collection material. This study uses the SmartPLS 3.0 analysis tool. The results of the research show that (1) IT modernization has no effect on the results of financial reports; (2) government accounting standards (SAP) affect the results of financial reports; (3) HR capacity strengthens the positive effect of IT modernization on financial reporting results; and (4) HR capacity strengthens the positive influence of SAP on financial reporting results.

Keywords: Modernisasi IT, SAP, Financial Report, and HR Capacity

PENDAHULUAN

Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan menutup tahun 2021 dengan kembali berada di zona merah Covid-19. Covid-19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu *Sars-CoV-2*, yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyebaran Covid-19 ini mulai menyerang ke seluruh dunia. Di Indonesia, terutama kota Palembang virus Covid-19 mulai menyerang kesehatan sejak 17 Maret 2020. Hampir seluruh negara di dunia mengubah kebijakan pemerintah di era pandemi ini. Pemerintahan masing-masing negara mengambil kebijakan “new normal” dalam mencegah penyebaran Covid-19. *New normal* adalah langkah penanganan Covid-19 dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi, dimana masyarakat merubah perilaku dengan menjalankan aktivitas normal dan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. (Muhyiddin, 2020)

Gap yang menjadi penelitian ini adalah perkembangan keuangan daerah kota Palembang di triwulan I 2021 untuk realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan oleh akselerasi transfer dan penyerapan dana pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di kota Palembang sejalan dengan telah dimulainya pelaksanaan vaksinasi. Kota Palembang merupakan salah satu dari 17 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang mendukung percepatan digitalisasi dan peningkatan digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah melalui kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dan pemerintah provinsi lainnya terkait elektronifikasi transaksi pemda.

Realisasi pendapatan pemerintah (APBD) di kota Palembang pada triwulan I 2021 sebesar 17,23% dari target atau senilai Rp 6,87 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 14% dari target atau Rp 5,86 triliun. Realisasi belanja pemerintah

(APBD) di kota Palembang pada triwulan I 2021 sebesar Rp 3,12 triliun atau 7,48% dari pagu, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 8% dari pagu atau senilai Rp 3,56 triliun. Penurunan tersebut berasal dari realisasi belanja Transfer yang hanya mencapai 1,9% dari pagu Rp 6,17 triliun, sedangkan pada periode yang tahun 2020 mencapai 5%. Sedangkan, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada triwulan I 2021 sebesar Rp 6,56 triliun atau 25,06% dari pagu, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 5,75 triliun atau 19,73% dari pagu. Peningkatan realisasi ini dikarenakan indikator keberhasilan kebijakan simplifikasi proses penyaluran TKDD dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Tabel 1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan APBD dan TKDD Kota Palembang s/d Triwulan I Tahun 2020-2021 (miliar rupiah)

Uraian	2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	42.664	5.865	14%	39.923,51	6.877,34	17,23
Belanja Daerah	42.717	3.565	8%	41.705,98	3.121,40	7,48%
TKDD	29.128,45	5.748,36	19,73	26.195,24	6.564,26	25,06

Sumber: Pemda Lingkup Sumatera Selatan (Triwulan I 2021, diolah)

Di kehidupan sosial, Pemerintah Indonesia memberlakukan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakibat kurangnya interaksi dalam hal komunikasi dan bertemu dengan orang lain. Efek dari *social distancing* dan PSBB ini adalah di bidang ekonomi, Covid-19 menurunkan perekonomian dengan drastis. Penurunan permintaan masyarakat berdampak serius terhadap dunia usaha (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Pemutusan hubungan kerja, tidak diperpanjangnya kontrak kerja, tawaran cuti tanpa digaji, pengurangan jam kerja hingga ditutupnya usaha. Dalam organisasi pemerintahan, menyebabkan defisit keuangan daerah/kota menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat, daerah hingga ke pelosok desa.

Laporan keuangan sebagai media penyampaian informasi harus dapat memberikan penjelasan kepada para pemakainya mengenai dampak pandemi Covid-19 dan dampaknya pada kinerja keuangan perusahaan. Untuk entitas pemerintahan, sektor publik adalah pelaku utama penanganan pandemi Covid-19. Dalam hal akuntansi, tim kerja penanggulangan pandemi Covid-19 perlu ditampilkan dalam laporan keuangan entitas pemerintahan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan penjelasan bagi entitas pemerintahan untuk penyajian informasi yang relevan dengan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya SAP mendorong akuntabilitas dan transparansi keuangan tetap menjadi perhatian utama dalam era pandemi ini sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, yang dapat menghindari kesalahpahaman, dan dapat menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani krisis yang terjadi.

Penerapan Teknologi Informasi (IT) pemerintahan dan *Big Data* pemerintahan dapat mengakomodir peran pelaku usaha pada ekosistem digital terkait proses, struktur, prinsip, kebijakan dan kerangka kerja informasi budaya, etika dan perilaku SDM, kemampuan dan kompetensi layanan, infrastruktur IT dan sistem aplikasi yang digunakan. Untuk menanggapi ketidakpastian bisnis dan ekonomi global, baik itu perusahaan maupun pemerintah dituntut untuk beradaptasi cepat dan mengambil keputusan yang tepat agar kesinambungan layanan dan usaha tetap kuat

Standar keuangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari empat standar, salah satunya adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dirancang oleh IAI melalui Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merumuskan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang harus diterapkan oleh entitas pemerintahan. Tujuan SAP dirancang

adalah untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi ditandai dengan berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Menurut (Nasution, 2017) dengan judul penelitiannya Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia menyatakan bahwa ada dampak positif dan negatif modernisasi. Salah satu dampak positif, modernisasi adalah adanya transfer teknologi dari Negara maju kepada Negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Sedangkan dampak negatifnya adalah muncul sikap individualisme lebih mendominasi.

Isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Pasal 2) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menyatakan bahwa daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah kepada Pemerintah (Peraturan Pemerintah, 2014). Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan Daerah kepada Pemerintah mencakup (a) APBD dan realisasi APBD provinsi, Kabupaten dan Kota; (b) Neraca daerah; (c) Laporan arus kas; (d) Catatan atas laporan keuangan daerah; (e) Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; (f) Laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan (g) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Di era pandemi Covid-19, peran IT menjadi semakin meningkat dan sangat penting. Setelah pemberlakuan pembatasan berkerumun, para pegawai pemerintah, pelaku usaha dan *stakeholders* menerapkan *work from home*. Untuk mengambil keputusan yang tepat, dalam hal ini pemerintah selaku pembuat kebijakan, diperlukan cara efektif untuk mengelola data-data tersebut menjadi informasi yang berguna sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Proses administrasi pada sistem pemerintahan terus terjadi setiap hari dan tanpa jeda. Pembentukan data yang sangat banyak dan besar mengakibatkan banyaknya tenaga dan *effort* yang dibutuhkan.

Terkait rencana kerja pemerintah tahun 2020 adalah target pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan penguasaan Teknologi Informasi (IT). Dengan adanya *Big Data, validity* akan data yang masuk dan keluar menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Implementasi *Big Data* Pemerintahan dibutuhkan kemampuan teknisi beragam, yaitu kapasitas SDM yang dibutuhkan untuk bidang IT.

Rumusan masalah yang menjadi pedoman studi ini adalah:

1. Apakah modernisasi teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang ?
2. Apakah adopsi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
3. Apakah keahlian SDM memoderasi hubungan antara modernisasi teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?
4. Apakah keahlian SDM memoderasi hubungan antara adopsi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang?

STUDI LITERATUR

Teori *Good Governance*

Berdasarkan pengertian *good governance* oleh Mardiasmo (2009: 18) dan Bank Dunia dalam Wahab (2002: 34) perlunya mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya.

Menurut Sofian Effendi (2005) terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu *good governance*, adalah pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat sipil), dan pasar atau nilai usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan tercapai

jika penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang seimbang dan bersinergi. Menurut Sadjijono (2007), pengertian *good governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara.

Definisi lain mengenai *good governance* adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik dan ekonomi. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi. Artinya untuk terlaksananya *good governance*, maka pemerintah harus melibatkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.

Hipotesis Penelitian

Modernisasi Teknologi Informasi (IT) terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Adanya Covid-19 berdampak pada ketidakpastian bisnis dan ekonomi global, dimana entitas dituntut beradaptasi cepat dan mengambil keputusan tepat agar arus kesinambungan layanan dan usaha tetap terjaga. Oleh sebab itu, solusi yang ditawarkan adalah modernisasi teknologi informasi (IT) yang dapat digunakan oleh tim manajemen dalam hal mengelola data dalam jumlah besar. Modernisasi teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting di era pandemi Covid-19. Pemerintah dalam pengambilan keputusan yang tepat maka harus ada pertimbangan data-data yang masuk maupun keluar. Jalannya pengadministrasian di system pemerintahan terus terjadi setiap hari dan tanpa jeda. Salah satu peluang yang harus digunakan oleh pemerintahan adalah dengan cara modernisasi Teknologi informasi (IT).

Penelitian yang telah dilakukan Juwita (2013) memberikan bukti adanya pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pada laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu. Penelitian Upabayu dan Putra (2014:26) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi atau sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 1 yang diajukan adalah

H₁: Modernisasi Teknologi Informasi (IT) berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Adopsi SAP terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Palembang di masa Covid-19

Adopsi SAP merupakan kunci keberhasilan dari penyusunan pelaporan keuangan entitas. Pandemi Covid-19 juga berpengaruh cepat terhadap proses penyusunan laporan keuangan, pihak-pihak terkait dalam penyusunan sampai dengan penerbitan secara langsung laporan keuangan; pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung pada pelaporan keuangan baik itu asosiasi konsultan profesi para akuntan di Indonesia dan Negara-negara lain juga; dan alat-alat yang

digunakan oleh pihak tersebut dalam menyusun laporan keuangan seperti SAK, Standar audit, Perundang-undangan, kode etik profesi dan sertifikasi profesi.

Penelitian Andriani (2010:18) memberikan bukti bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh satuan kerja. Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan mereka kerjakan. Pemahaman pegawai terhadap standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota. Penelitian yang dilakukan Andriani (2010:28) juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 2 yang diajukan adalah

H₂: Adopsi SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Kapasitas SDM terhadap hubungan antara modernisasi Teknologi Informasi (IT) dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Persiapan sistem data informasi yang akurat dan cepat di pemerintahan kota diperlukan keahlian sumber daya manusia (SDM) untuk mengimplementasi sistem *big data* pemerintahan. Faktor penting yang harus di selaraskan dengan modernisasi teknologi informasi (IT) adalah keahlian SDM. Dalam rangka penerapan modernisasi IT, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah mengembangkan Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pengembangan aplikasi tersebut dibutuhkan seorang yang mampu dan ahli di bidang akuntansi yang mampu mengintegrasikan proses pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sesuai siklus akuntansi.

Penelitian Juwita (2013) menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Upabayu dkk (2014) menunjukkan hasil penelitian dengan variabel kemampuan SDM dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan dua penelitian diatas bahwa faktor teknologi mampu mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mampu digunakan oleh pengguna laporan tersebut serta mampu dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 3 yang diajukan adalah

H₃: Kapasitas SDM memoderasi antara modernisasi Teknologi Informasi (IT) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Kapasitas SDM terhadap hubungan antara adopsi SAP dengan laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Laporan keuangan yang dihasilkan dari adopsi SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik itu para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini

sejalan dengan prinsip akuntansi yaitu biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

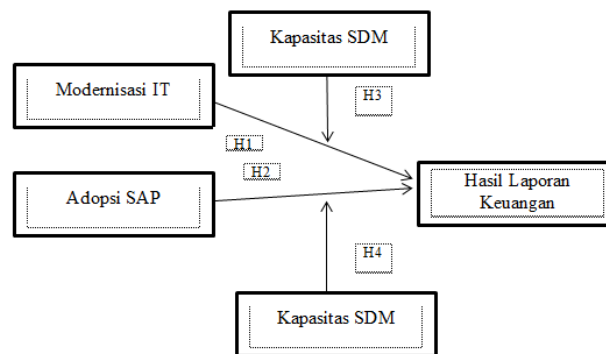
Menurut penelitian menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini didukung oleh penelitian Rovianti (2011) yang menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan konsep dan bukti empiris yang diperoleh dari penelitian sebelumnya, hipotesis 4 yang diajukan adalah

H₄: Kapasitas SDM memoderasi antara SAP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang di masa Covid-19

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen: modernisasi IT dan SAP. Variabel moderasi dalam penelitian yaitu kapasitas SDM. Dan variabel dependennya yaitu hasil laporan keuangan. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir



Sumber: Data yang Diolah

METODE

Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh PNS/Non PNS yang berpendidikan Sarjana (S1) semua jurusan yang bekerja di masing-masing SKPD. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *nonprobability sampling* dengan cara *convenience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 72 responden.

Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan data primer. Data primer dalam penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada SKPD (yang berupa PNS/Non PNS yang berpendidikan Sarjana) di Kota Palembang pada bulan September 2022. Kuesioner yang disebar sebanyak 120 dan yang digunakan yaitu sebanyak 72 kuesioner.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa *SmartPLS 3.0* dengan 2 (dua) tahap pengujian yaitu pengujian *outer model* (model pengukuran) untuk menguji validitas dan reliabilitas, serta pengujian *inner model* (model struktural) untuk menguji hipotesis (Ghozali & Latan, 2015).

HASIL

Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*Outer model*) digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas model. Dalam uji validitas ada dua pengujian yaitu *convergent validity* dan *discriminant validity*. Untuk menguji *convergent validity* menggunakan nilai *outer loading* atau *loading factor* dan nilai *average variance extracted* (AVE). Suatu indikator dikatakan memenuhi *convergent validity* dalam kategori baik apabila nilai *outer loading* >0,7 dan nilai AVE >0,5 (Ghozali & Latan, 2015). Dari hasil olah data, masing-masing indikator variabel penelitian memiliki nilai *outer loading* >0,7, dan nilai *average variance extracted* (AVE) menunjukkan nilai di atas 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa data tersebut valid. Berikut tabel *outer loading* setelah uji indikator dan tabel *average variance extracted* (AVE).

Tabel 1. Hasil Uji *Outer Model* (Model Pengukuran)
yang menunjukkan *Outer Loading* Setelah Uji Indikator

Variabel	Indikator	<i>Outer Loadings</i>	Keterangan
Modernisasi Teknologi Informasi	X1-4	0,810	Valid
	X1-5	0,845	Valid
	X1-6	0,857	Valid
	X1-7	0,769	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	X2-1	0,714	Valid
	X2-2	0,768	Valid
	X2-3	0,776	Valid
	X2-4	0,745	Valid
	X2-5	0,844	Valid
	X2-6	0,876	Valid
	X2-7	0,830	Valid
	X2-8	0,872	Valid
	X2-9	0,890	Valid
	X2-10	0,828	Valid
	X2-11	0,830	Valid
	X2-12	0,769	Valid
Hasil Laporan Keuangan	Y3-1	0,791	Valid
	Y3-3	0,747	Valid
	Y3-5	0,766	Valid
	Y3-6	0,798	Valid
	Y3-7	0,834	Valid
	Y3-8	0,784	Valid
	Y3-9	0,715	Valid
Y3-10	0,760	Valid	
Kapasitas SDM	Z1-6	0,811	Valid
	Z1-7	0,806	Valid
	Z1-8	0,865	Valid
	Z1-9	0,795	Valid
	Z1-10	0,879	Valid
	Z1-11	0,746	Valid
Z1-12	0,741	Valid	

Sumber: Hasil olah data, 2022

Tabel 2. Average Variance Extraced (AVE)

	Average Variance Extraced (AVE)
Modernisasi IT	0,674
SAP	0,662
Hasil Laporan Keuangan	0,601
Kapasitas SDM	0,652

Sumber: Hasil olah data, 2022

Untuk menguji validitas suatu model dapat juga dilakukan dengan melihat *discriminant validity*. Dengan melihat nilai *fornell-larcker criterion* (akar AVE) dan nilai *cross loadings* (Ghozali dan Latan, 2015). Diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel memiliki nilai *cross loadings* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loadings* pada variabel lainnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya. Berikut tabel *fornell-larcker criterion* dan tabel *cross loadings*.

Tabel 3. Fornell Larcker Criterion

	SAP	Hasil Lap Keu	Kapasitas SDM	Modernisasi IT
SAP	0,814			
Hasil Laporan Keuangan	0,638	0,775		
Kapasitas SDM	0,584	0,719	0,808	
Modernisasi IT	0,597	0,555	0,675	0,821

Sumber: Hasil olah data, 2022

Tabel 4. Cross Loadings

	Modernisasi IT	SAP	Hasil Lap Keu	Kapasitas SDM
X1-4	0,810	0,470	0,419	0,488
X1-5	0,845	0,499	0,596	0,656
X1-6	0,857	0,519	0,455	0,555
X1-7	0,769	0,472	0,286	0,480
X2-1	0,473	0,714	0,387	0,444
X2-2	0,523	0,768	0,517	0,451
X2-3	0,531	0,776	0,509	0,404
X2-4	0,411	0,745	0,488	0,486
X2-5	0,527	0,844	0,444	0,503
X2-6	0,520	0,876	0,469	0,461
X2-7	0,483	0,830	0,519	0,475
X2-8	0,444	0,872	0,533	0,538
X2-9	0,532	0,890	0,579	0,528
X2-10	0,506	0,828	0,616	0,423
X2-11	0,442	0,830	0,607	0,477
X2-12	0,437	0,769	0,513	0,451
Y3-1	0,484	0,437	0,791	0,603
Y3-3	0,454	0,476	0,747	0,534
Y3-5	0,417	0,556	0,766	0,558
Y3-6	0,565	0,587	0,798	0,668
Y3-7	0,411	0,533	0,834	0,541
Y3-8	0,405	0,455	0,784	0,534

Y3-9	0,294	0,461	0,715	0,558
Y3-10	0,367	0,428	0,760	0,544
Z1-6	0,702	0,458	0,538	0,811
Z1-7	0,476	0,463	0,589	0,806
Z1-8	0,631	0,475	0,528	0,865
Z1-9	0,376	0,446	0,662	0,795
Z1-10	0,483	0,537	0,733	0,879
Z1-11	0,548	0,466	0,557	0,746
Z1-12	0,598	0,447	0,435	0,741

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dalam uji reliabilitas ada dua cara pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan melihat *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* dan *cronbach's alpha* apabila memiliki nilai > 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015).

Tabel 5. *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Modernisasi IT	0,864
SAP	0,959
Hasil Laporan Keuangan	0,923
Kapasitas SDM	0,929

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan nilai *composite reliability* semua variabel >0,7. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Tabel 6. *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Modernisasi IT	0,841
SAP	0,953
Hasil Laporan Keuangan	0,905
Kapasitas SDM	0,910

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,7 (>0,7). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau reliabel.

Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural (*inner model*) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Berikut tabel koefisien determinasi dari model (*R-Square*):

Tabel 7. *R-Square*

	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Hasil Laporan Keuangan	0,589	0,572
Kapasitas SDM	0,506	0,493

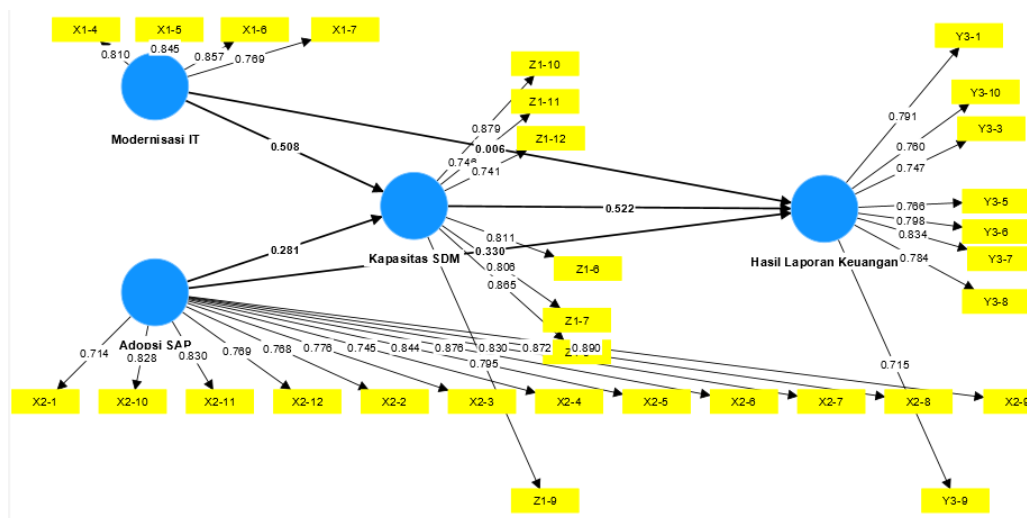
Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari hasil *R-Square* pada tabel di atas menunjukkan bahwa persentase besarnya variabel hasil laporan keuangan yang dijelaskan oleh variabel modernisasi IT dan standar akuntansi

pemerintah sebesar 0,589 atau 58,9% dan sisanya 0,411 atau 41,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti. Variabel kapasitas SDM dapat dijelaskan oleh variabel modernisasi IT dan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,506 atau 50,6% dan sisanya 0,494 atau 49,4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

4.4. Analisis Structural Equation Model (SEM)

Analisis selanjutnya adalah analisis *Structural Equation Model (SEM)* secara *Full Model* yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam *Structural Equation Model* dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi. Hasil pengolahan data untuk analisis SEM terlihat pada Gambar 2 dibawah ini:



Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *path coefficients*, *t-statistics* dan nilai *p-values*. Dalam hal ini, hipotesis dalam penelitian dapat diterima apabila nilai *t-statistics* >1,96 dan *p-values* <0,05. Berikut adalah data untuk *path coefficients*, *t-statistics* dan *p-values*:

Tabel 8. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path Coefficients	T-Statistics (O/STDEV)	P-Values	Keterangan
H1 : Modernisasi IT → Laporan Keuangan	0,006	0,046	0,964	Tidak signifikan
H2 : SAP → Laporan Keuangan	0,330	2,420	0,016	Signifikan
H3 : Modernisasi IT → Kapasitas SDM → Laporan Keuangan	0,265	2,323	0,020	Signifikan
H4 : SAP → Kapasitas SDM → Laporan Keuangan	0,147	1,992	0,046	Signifikan

Sumber: Hasil olah data, 2022

PEMBAHASAN

Tabel di atas menunjukkan bahwa *path coefficient* modernisasi IT terhadap hasil laporan keuangan 0,006 dengan nilai *t-statistic* 0,046 (<1,96), dan nilai *p-value* 0,964 (>0,05) maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) tidak didukung (ditolak). Hasil yang tidak berpengaruh tersebut tidak sejalan dengan penelitian (Juwita, 2013), mengenai pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap hasil pada laporan keuangan. Pada penelitian tersebut

menyatakan bahwa teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya.

Hipotesis kedua didukung (diterima) karena *path coefficient* standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap hasil laporan keuangan 0,330, nilai *t-statistic* 2,420 (>1.96), dan nilai *p-value* 0,016 (<0,05). Hasil yang berpengaruh ini sejalan dengan penelitian (Kusuma dan Arif. A, 2012) yang menyatakan penerapan SAP mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Sehingga semakin baik penerapan SAP maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.

Sementara itu Hipotesis ketiga (H3), *path coefficient* kapasitas SDM terhadap hubungan antara modernisasi Teknologi Informasi (IT) dengan laporan keuangan yaitu 0,265 dengan nilai *t-statistic* 2,323 (>1,96), dan nilai *p-value* 0,020 (<0,05) maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) didukung (diterima). Hasil ini sependapat dengan penelitian (Upabayu dkk, 2014) tentang variabel kemampuan SDM dan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor teknologi mampu mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mampu digunakan oleh pengguna laporan tersebut serta mampu dipertanggungjawabkan..

Hipotesis keempat (H4) juga didukung (diterima) karena kapasitas SDM terhadap hubungan antara adopsi SAP dengan laporan keuangan 0,147; nilai *t-statistic* 1,992 (>1.96); dan nilai *p-value* 0,046 (<0,05). Hasil yang berpengaruh tersebut sependapat dengan penelitian (Kadek, 2014) tentang kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan melihat kompetensi SDM dapat menumbuhkan keakuratan dalam perhitungan dan ketepatan waktu dalam pengumpulan kualitas laporan keuangan dengan tepat.

KESIMPULAN

Hasil pengujian melalui alat analisis SEM dapat diketahui bahwa indikator kapasitas SDM memperkuat pengaruh positif modernisasi Teknologi Informasi (IT) terhadap laporan keuangan merupakan indikator yang paling dominan pertama dari laporan keuangan. Hal tersebut bermakna bahwa kapasitas SDM memoderasi antara Modernisasi IT terhadap laporan keuangan merupakan kunci nilai dalam laporan keuangan. Semakin tanggap pemanfaatan teknologi informasi, maka akan meningkatkan ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan indikator kapasitas SDM memperkuat pengaruh positif Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap laporan keuangan merupakan indikator kedua yang juga dominan dari hasil laporan keuangan. Hal tersebut bermakna bahwa kapasitas SDM memoderasi antara Standar Akuntansi Pemerintah terhadap laporan keuangan merupakan kunci nilai dalam kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan.

REFERENSI

- Dwirini. Kosim, Abu. Rahmawati, Meita. (2020). *The Effect of Accountability, Disclosure, And Reporting On The Use Of Village Fund Finances On Community Welfare*. Prosiding International 6th SEABC. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. UNDIP.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). *IAI Peduli Covid-19: Percepatan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Akuntan* (S. M. Hery Subowo, Maliki Heru Santosa (ed.); 63rd ed.). Ikatan Akuntan Indonesia. <http://iaiglobal.or.id/v03/files/buku63/index.html#p=1>
- Ikhwandha, M. F., & Hidayati, A. (2019). The Influence of Accountability , Transparency , and Affective and Cognitive Trusts on Interest in Paying Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 23(1), 39–51.

- Juwita, R. (2013). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201. <https://doi.org/10.23969/trikononika.v12i2.480>
- Kadek, D. dkk. (2014). PENGARUH KOMPETENSI SDM, PENERAPAN SAP, DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Kholmi Masiyah. 2012. *Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah Dalam Masyarakat Islam*. Volume 15 No 1.
- Kusumah, Arif A, 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan (Studi pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya)*. *Jurnal Penelitian Akuntansi*. Volume IX. Nomor 2. Pp.110.
- Mardaningsih, I. D. (2020). *Pengaruh Faktor Kepercayaan, Lokasi, Dan Citra Lembaga Terhadap Keputusan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten Membayar Zakat Tidak Melalui Badan Amil Zakat Klaten*.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV, 240–252. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi26qq8w7L8AhVTjuYKHStiDFEQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.bappenas.go.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F118%2F89%2F&usq=AOvVaw0nwlhkFUskU6v5jkolv4AE>
- Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Modernisasi dan Globalisasi terhadap Perubahan Sosial Budaya di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 21(1), 30–42.
- Peraturan Pemerintah. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan*, 14, 1–20. www.bphn.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sadjijono. 2007. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama: Yogyakarta.
- Setiyawati, Hari, 2013, The effect of Internal Accountant’s Competence, Manager’s Commitment to Organizations and the Implementation of the Internal Control System on the Quality of Financial Reporting, *International Journal of Business and Management Invention*. Volume 2 Issue 11, November. 2013, ISSN (Online): 2319 – 8028, PP.19-27.
- Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Upabayu I Putu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra, 2014, Analisis Faktor,-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 230-244 ISSN: 2302-8556.